PANDANGAN SOSIAL EKONOMI DAN KEAGAMAAN MASYARAKAT PETANI DI JAWA

Nur Khoiriyah
Dosen Institut Pesantren Mathali'ul Falah
Email: nurkhoiriyah.kampus2016@gmail.com

Abstact

The life of the farming community is still very far from prosperous. This is evident from the data presented statistically relevant data on poverty and education levels. With such reality is, there should be a variety of efforts to resolve this problem. The resolution attempts to start the real state of the farming communities, for that, this article will provide an overview of the socio-economic and religious views of the farming community in the literature. Based on this basis, the author tries to give a deeper formulation related to the farming community problem solving.

Keywords**:** *Farm Society, Economic-Social, and Religius.*

Abstrak

Kehidupan masyarakat petani masih sangat jauh dari kata sejahtera. Hal ini terlihat dari data yang tersaji secara statistik terkait data kemiskinan dan tingkat pendidikan. Dengan realitas seperti ini, perlu dilakukan berbagai upaya penyelesaian masalah ini. Upaya penyelesaian harus mulai dari keadaan riil masyarakat petani, untuk itu, tulisan ini akan memberikan gambaran mengenai pandangan sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat petani secara kepustakaan. Berdasarkan basis inilah, penulis mencoba memberikan rumusan secara lebih mendalam terkait pemecahan masalah masyarakat petani.

Kata Kunci: *Masyarakat Petani, Sosial Ekonomi, dan Keagamaan.*

A. Pendahuluan

Kehidupan petani sangat identik dengan keterbelakangan dan kemiskinan. Dengan BPS Jawa Tengah tahun 2015 menunjukkan daerah-daerah dengan pola perekonomiannya non pertanian memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah.[1] Secara bersamaan data Angka Partisipasi Sekolah berdasarkan kabupaten menunjukkan hal yang cenderung sama. Beberapa kabupaten dengan basis perekonomian pertanian memiliki tingkat partisipasi rendah.[2]

Ada dua faktor yang mempengaruhi kehidupan masyarakat petani yaitu kebudayaan dan keagamaan. Masyarakat petani memiliki karakter yang berbeda

[1] Diunduh dari https://jateng.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/20 pada 10/03/2017
[2] Diunduh dari https://jateng.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/10 pada 10/03/2017

ISSN: 2089-8142 (p)
©2017 Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman

dengan masyarakat lainnya. Kegiatan perekonomian yang mengikat masyarakat hidup di wilayah pedesaan menjadi keterikatan antara manusia dengan lahan. Sebagaimana disinggung dalam berbagai literatur sosiologi perkotaan dan sosiologi pedesaan, kota selalu diidentikkan dengan pekerjaan industri dan jasa, sedangkan desa identik dengan agraris.[3] Pola perekonomian yang berbeda ini menyebabkan pola kehidupan berbeda yang terkadang tidak dipahami oleh masyarakat di luar komunitas yang ada.

Dari aspek keagamaan masyarakat petani lebih relijius. Beberapa indikatornya adalah keberadaan santri, pesantren, dan kyai di dalam suatu daerah. Data Kanwil Departemen Agama Jawa Tengah tahun 2015 menunjukkan daerah dengan basis pertanian memiliki jumlah santri, kyai, dan pesantren cenderung ebih banyak.[4] Pemikiran ini mungkin bertentangan dengan realitas keagamaan terbaru di Indonesia. Di masyarakat muslim erkotaan mulai bermunculan kegiatan keagamaan yang lebih masif dengan beragam artikulasi.

Dari alur di atas memberikan hipotesis, bahwa tingkat kemiskinan masyarakat petani terkait dengan kebudayaan, dan pemahaman keagamaan mereka. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat petani terkait sosial ekonomi dan keagamaan mereka?. Dua hal inilah yang akan penulis bahas secara mendalam dalam tulisan ini. Tulisan ini merupakan telaah literatur terkait pandangan sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat petani. Dengan menggunakan data-data statistik yang tersedia dari pemerintah melalui website, penulis memaparkan keadaan sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat serta menggunakan berbagai literatur sebagai alat penglihatan secara lebih kritis terhadap realita yang ada. Penulis menawarkan *problem solving* pada masalah yang ada dengan mengkritisi kebudayaan dan membentuk cara berfikir agama yang terbuka.

B. Memahami Petani: Perekonomian Subsisten di Pedesaan

James C. Scott dalam bukunya yang berjudul *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Substence in Southeast Asia* memberikan gambaran mengenai kehidupan petani secara umum di Asia Tenggara. Meski secara eksplisit Victor memberikan

[3] Alfien Pandaleke, *Sosiologi Perkotaan,* (Bogor: Maxindo Internasional, 2015), hlm. 10
[4] Diunduh dari https://jateng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1101 pada 10/03/2017

kritik pada Scott karena menganggap kaum petani itu sangat lemah dan hanya bisa memikirkan perekonomian pada hari itu saja, ada beberapa hal yang bisa dipelajari.[5]

Ada dua tesis dari pemikiran Scott yaitu "Dahulukan Selamat" dan "Distribusi Resiko" yang disimpulkan berdasarkan studi kehidupan petani di Burma dan Vietnam.[6] Tesis ini relevan dengan dengan keadaan pertanian yang ada di negara ini. Perilaku ekonomi masyarakat petani berbeda dengan masyarakat kapitalis. Hal ini berbeda karena unit konsumsi dan produksi dilakukan oleh unit yang sama. Tujuan atau *goal* yang ingin dicapai dalam masyarakat petani masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan keluarga (subsisten).

Anggota keluarga perunit yang cenderung lebih besar dibanding dengan masyarakat kapitalis menjadi beban ekonomi yang cukup besar. Selain itu, semua bagian dalam kegiatan ekonomi pertanian mulai dari memilih bibit, teknik bercocok tanam, penentuan waktu, rotasi tanam dan sebagainya dilakukan secara bersama dengan tingkat keberhasilan panen yang tidak menentu. Hal inilah yang mendorong munculnya prinsip pengutamaan keselamatan dalam sistem perekonomian mereka. Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Sosiologi memberikan gambaran mengenai pertanian subsisten. Cara bertani tradisional tidak efesien karena belum menggunakan teknologi yang baru.[7]

Pola perilaku perekonomian masyarakat petani lebih mendahulukan penghindaran terhadap resiko. Pola-pola inovasi seperti melakukan investasi seperti pembuatan sumur pompa, mengubah cara-cara bertanam dan menggunakan bibit padi unggulan sangat jarang dilakukan. Perilaku ini membentuk kehidupan ekonomi yang menjamin terpenuhinya kebutuhan atau subsistensi yang stabil.

Selain minimnya inovasi, tingkat bencana dalam pertanian menjadikan pendahuluan selamat menjadi semakin kuat dalam masyarakat petani. Kegagalan panen karena faktor alam Kegagalan panen karena faktor alam seperti banjir dan

---

[5]Victor T. King, Moral Ekonomi Petani: Antara Subsistensi dan Resistensi diunduh dari http://etnohistori.org/moral-ekonomi-petani-antara-subsistensi-dan-resistensi.html pada 14/03/2017

[6] James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara,* (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 17

[7]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 136

kemarau panjang contoh bencana yang cukup besar bagi masyarakat petani.[8] Banjir di beberapa wilayah Jawa menjadi bencana yang datang setiap tahun. Hal ini menyebabkan gagal panen masyarakat petani karena produksi pertanian buruk bahkan gagal. Pada musim kemarau panjang, sumber air yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan. Sehingga menimbulkan krisis pada masyarakat.

Masa krisis tidak serta merta membuat masyarakat petani mati kelaparan. Sebagaimana konsep umum dalam pertanian subsisten, lahan yang sempit biasanya ditanami dengan berbagai macam tanaman umbi-umbian, atau kacang-kacangan lainnya sehingga tingkat kebutuhan dalam unit keluarga bisa dipenuhi. Selain itu, homogenitas dan ikatan kekeluargaan juga menjadi salah satu penjamin keberlangsungan kehidupan. Hal ini terlihat dari kebiasaan menitipkan anak ke saudara-saudara sekitar rumah saat mereka harus pergi ke luar daerah. Keadaan yang sangat minim dan bahkan menghadapi kebuntuan ini membuat perekonomian masyarakat petani bahkan susah untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Scott sebagai pencetus "Dahulukan Selamat" memiliki alur logika yang dalam. Dalam hal memilih jenis bibit dan cara-cara bertanam, masyarakat petani lebih memilih meminimkan terjadinya bercana ketimbang memaksimalkan penghasilan rata-rata. Strategi ini mengesampingkan pilihan yang memberikan harapan yang mendatangkan hasil bersih rata-rata tinggi dengan risiko kerugian yang besar. Selain itu, pemilihan jenis tanaman lebih mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dibanding dengan hasil untuk dijual.[9]

Distribusi risiko dalam masyarakat petani terlihat dalam pengambilan pajak secara "paksa" oleh pemerintah di beberapa negara tempat penelitian Scott. Dalam diagram di bawah ada gambaran mengenai dua jenis pemungutan pajak yaitu menunjuk pada satuan jumlah yang tetap pada semua musim dan menunjuk pada satuan prosentase hasil panen. Pola pertama memperlihatkan bahwa dengan penentuan jumlah tetap pajak akan memberikan stabilitas pendapatan pemerintah,

[8]James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara,* (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 24

[9] James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara,* (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 28

tetapi tidak sesuai dengan etika subsistensi. Etika subsistensi ini mencakup adanya hak-hak yang dimiliki oleh petani untuk tetap hidup dalam keadaan apapun. Sedangkan dalam pola kedua terdapat etika subsistensi. Hal ini bisa terlihat dari pengambilan prosentasi hasil panen. Jika masyarakat petani mendapatkan hasil panen melimpah makan akan mengeluarkan pajak yang cukup besar. Jika masyarakat petani mendapatkan hasil yang rendah bahkan gagal, mereka tetap mengeluarkan berdasarkan prosentase pendapatan. Meski secara jumlah dua mekanisme ini bisa jadi lebih banyak yang kedua, namun secara etika, dan kesadaran masyarakat, pola yang kedua lebih banyak dianggap manusiawi.[10]

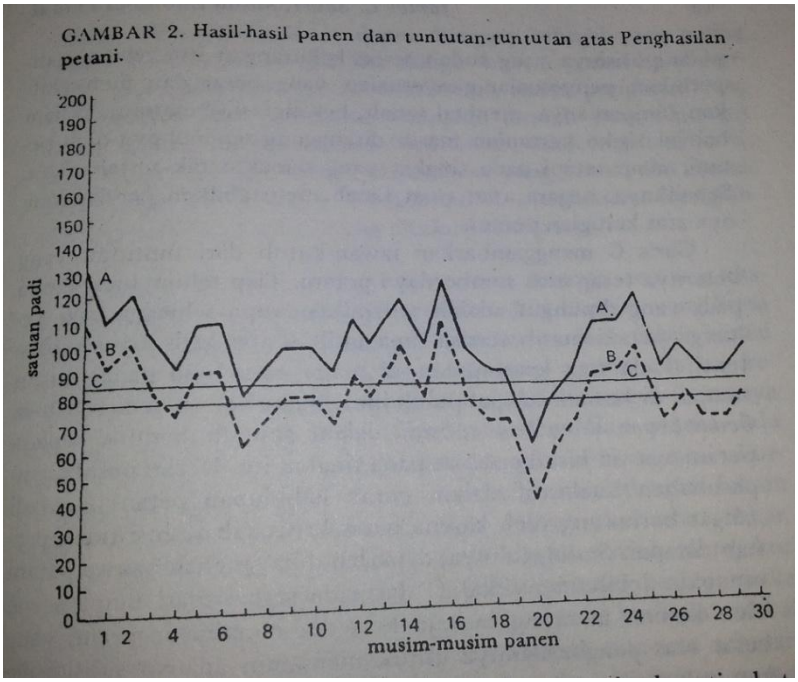

Sumber : James C. Scott, Moral Ekonomi Petani:
Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara

Dari penjabaran di atas keadaan sosial pola perekonomian masyarakat petani bisa digambarkan sebagai alur yang *flat.* Bermacam pilihan pola pengembangan ekonomi lebih banyak menggunakan logika dahulukan selamat. Pilihan bibit, inovasi penanaman, manajemen pengelolaan sampai pada produksi semua ditangani secara

[10] James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara,* (Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 45

internal dalam satu unit. Selain itu, prospek pemenuhan kebutuhan yang masih sangat besar menjadi salah satu pertimbangan lainnya. Resiko bencana yang tidak menentu semakin menambah pola perekonomian dalam sektor ini semakin tida menentu. Keadaan seperti ini tidak sepenuhnya sama dengan petani Indonesia, terutama daerah Jawa. Namun demikian pola-pola tertentu seperti pola tanam tradisional, pengelolaan yang masih satu unit dan minimnya inovasi masih banyak terjadi di berbagai daerah pertanian di Jawa.

C. Pandangan Sosial Keagamaan Masyarakat Petani

Berbicara mengenai sosial keagamaan, tidak bisa terlepas dari konteks kebudayaan suatu masyarakat. Dalam masyarakat Jawa, keberadaan suatu agama tidak terlepas dari unsur kebudayaan lokal. Secara konsep, para ahli ilmu sosial memberikan gambaran luas dalam mengartikan kebudayaan. Hal ini mencakup seluruh total dari pikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya, oleh karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia melalui proses belajar.[11]

Koentjaraningrat memberikan gambaran pada unsur-unsur kebudayaan terdiri dari sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi masyarakat, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan.[12] Urutan ini dibuat mulai dari nilai-nilai yang kuat dan sudah diubah, sampai pada nilai yang lemah dan mudah berubah.

Pembahasan ini, sistem religi dan upacara keagamaan masyarakat petani sangatlah kental. Berbagai ritual dalam tahapan produksi sektor agri ini banyak sekali, mulai dari masa tanam sampai musim panen. Ritual ini bisa dilakukan secara individu, maupun secara massal. Ritual individu biasanya dilakukan oleh perorangan dalam rangka memulai penanaman, seperti sesajen-sesajen. Pada awalnya kegiatan ini menimbulkan pertentangan dan perdebatan dari perspektif nilai agama. Namun pada perkembangannya pelurusan niat dan sikap akulturasi budaya yang disesuaikan dengan nilai-nilai agama bisa mendamaikan permasalahan ini. Ritual yang dilakukan secara massal biasanya dilakukan dalam lingkup luat suatu masyarakat. Ritual ini seperti sedekah bumi, sedekah laut, dan lain-lain. Dalam prespektif masyarakat hal ini menjadi bentuk rasa syukur pada Tuhan atas berbagai nikmat yang diberikan. Namun

[11] Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan,* (Jakarta: Gramedia, 2015), hlm. 2
[12] Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan,* (Jakarta: Gramedia, 2015), hlm. 3

jika dilihat secara sosiologis, hal ini bisa menjadi salah satu penggerak keeratan sosial masyarakat.

Sebagai sikap ilmiah dan kritik kebudayaan, Ignas Kleden memberikan gambaran mengenai sikap para ilmuwan sosial mengenai kebudayaan. Sebagaimana konsen ilmu-ilmu sosial yang menyelidiki tentang apa yang sudah ada atau relitas, begitupula cara para ilmuwan ini mencetuskan terkait kebudayaan. Kebudayaan adalah realitas yang sudah diciptakan, sudah dihasilkan, sudah terbentuk, atau sudah dilembagakan. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan dilihat sebagai hasil produk jikapun dilihat sebagai bentuk proses maka yang dilihat adalah prosesnya yang sudah ada, bagaimana sudah ada, dan sebagaimana sudah berjalan.[13]

Dalam pandangan ilmuwan sosial Indonesia, Koentjaraningrat kebudayaan termanifestasian dalam tiga bentuk yaitu sistem ide-ide, sistem tingkah laku, dan perwujudan benda-benda budaya.[14] Sistem ide-ide ini dilihat sebagai sebuah tatanan nilai atau norma yang sudah terbentuk dalam satu komunitas. Konsentrasinya tidak pada proses perumusan atau pembuatan kesepakatan suatu nilai itu dibentuk. Sedangkan sistem tingkah laku, melihat pola-pola interaksi yang sudah ada.

Dalam konteks masyarakat petani di Jawa, dilema perubahan kebudayaan ini tidak banyak terjadi, baik dari proses perubahan nilai, perubahan sistem pengetahuan maupun dari segi perilaku. Proses perubahan nilai dikatakan tidak terjadi ketika melihat masyarakat petani yang orientasinya lebih pada pemenuhan kebutuhan saja. Tidak banyak orientasi untuk mengembangkan atau ekspansi pasar pada hasil produksi tanam. Sedangkan dalam pengembangan nilai dan pengetahuan bisa dilihat dari pola perekonomian masyarakat yang minim inovasi dan penggunaan teknologi baru. Pola inovasi ini sangatlah lamban jika dibandingkan dengan sektor lain dalam masyarakat modern. Sedangkan pola perubahan tingkah laku masyarakat petani bahkan bisa dikatakan tidak mengalami pergeseran sama sekali. Dengan tingkat homogenitas kelompok dan ikatan nilai-nilai kekeluargaan berbasis keagamaan, kelompok ini membentuk pola perilaku yang mengikat sangat erat masyarakat.

[13] Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan,* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 166
[14] Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan,* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 168

Pelanggaran nilai-nilai berupa perilaku yang tidak diharapkan akan menimbulkan pergunjingan yang luar biasa.

Menurut Koentjaraningrat sistem religi dan upacara keagamaan merupakan hal yang tidak mudah berubah. Sebagaimana yang disampaikan dalam pengantar oleh Munawir Abdul Fattah, pertarungan antara modernisasi dan mempertahankan tradisi yang dilakukan oleh petani di Indonesia sudah lama dan terus saja terjadi.[15] Banyak sekali ritual yang berdimensi sosial kemasyarakatan seperti tahlilan, ziarah kubur, *dziba'an,* dan lain-lain.

Pembahasan sosial keagamaan ini tidak akan mempersoalkan beberapa ritual keagamaan massal tersebut, tetapi lebih memperhatikan cara pandang masyarakat petani dalam memahami ajaran agama Islam. Dalam berbagai literatur klasik terutama kitab kuning maupun buku-buku kontemporer, ada dua pembahasan penting, yaitu *ubudiyah* dan muamalah. *Ubudiyah* mencakup Kitab Taharah, Kitab Salat, Kitab Zakat, Kitab Puasa dan Kitab Haji dan Umrah sedangkan muamalah membahas Jual beli, hutang piutang dan lain-lain Selain keduanya berbagai pembahasan juga dijelaskan secara rinci,seperti pembagian waris, pernikahan, *Jinayat, Hudud* dan sebagainya.[16]

Pemaknaan tektual yang banyak dilakukan adalah penyempitan pola pembagian zakat pada penerimanya. Dalam arti tekstual zakat difahami sebagai kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.[17] Secara garis besar, empat madzhab memberikan gambaran mengenai penerima zakat yaitu: *faqir, miskin, amil, muallaf, hamba, orang yang berutang, sabilillah, dan musafir.* Secara lebih mendalam Sulaiman Rasjid memberikan gambaran mengenai hikmah adanya zakat meliputi, pertolongan untuk orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah, dan terhadap makhlukNya, memberikan pendidikan diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan diri membayar amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan, sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya, menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah, serta guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si

[15] Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-orang NU,* (Yogyakarta: LkiS, 2011), hlm. vii
[16] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. Xiii-xviii
[17] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 192

miskin dan si kaya.[18] Kegiatan yang sering dilakukan adalah adanya penyaluran langsung dari *muzakki* pada *mustahiq*. Hal ini secara hukum *fiqhiyah* tidak dilarang. Sebagaimana jawaban pertanyaan yang ditulis dalam karyanya Kiai Sahal Mahfudh.[19]

> "Tanya: Bolehkah zakat saya diserahkan langsung kepada faqir miskin. Jawab : adapun penyampaian zakat fitrah langsung kepada faqir miskin (tanpa melalui amil atau panitia zakat) boleh-boleh saja. Diperkenankan juga diwakilkan kepada orang lain, karena zakat termasuk ibadah kebendaan (*amaliyah*). Lain halnya dengan ibadah fisik, seperti sholat yang harus dikerjakan sendiri. (*al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*: III, 1972-1976)".

Zakat membentuk relasi tidak hanya dengan Tuhan tetapi juga berkaitan dengan umat. Zakat bertujuan memberdayakan *mustahiq* agar menjadi *muzakki*. Beberapa lembaga seperti Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika. Lembaga amil zakat atau LAZ mengelola zakat secara sistematis dan profesional. Lembaga ini memiliki visi menjadi lembaga pengelola zakat terunggul yang amanah dan profesional. Untuk mencapai visi tersebut, lembaga ini memiliki misi optimalisasi pengelolaan ZIS yang berkualitas, terukur, dan berdayaguna dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Lembaga ini memiliki tujuan meningkatkan kesadaran berzakat, infaq dan shadaqah, meningkatkan penghimpunan dana ZIS, meningkatkan penghimpunan dana ZIS, meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan profesionalitas lembaga, dan meningkatkan sinergi dan profesionalitas jaringan.[20]

D. Mengubah Cara Pandang Kebudayaan, dan Keagamaan Menuju Kesejahteraan Petani

Meminjam pembagian tipologi yang dipakai oleh Siti Aminah, dari sisi sosial ekonomi petani dibagi menjadi tiga yaitu petani, petani dengan lahan terbatas, dan petani tanpa lahan.[21] Masing-masing tipologi memiliki karakteristik yang berbeda. Tipologi petani sangat responsif terhadap teknologi baru, berorientasi pasar, memiliki sikap inovatif, berani mengambil resiko dan memiliki jaringan kerja sama yang lebih

[18] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 218

[19] Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat,* (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 163

[20] Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Departemen Agama RI, 2003 " Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia", hlm. 27

[21] Siti Aminah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 31

luas dari pada kelompok petani lainnya. Petani dengan lahan terbatas memiliki orientasi pasar, namun belum memiliki sumber daya memadai. Mereka memiliki kemauan untuk berkembang, namun perlu ada peningkatan kapasitas dan perluasan akses permodalan dan pasar sedangkan petani tanpa lahan kondisinya paling kurang menguntungkan. Selain ada keterbatasan aset, petani ini sangat bergantung kepada petani yang lebih maju. Pendapatan rumah tangga sangat rendah, sehingga harus bekerja juga di luar sektor pertanian.

Penggambaran kondisi masyarakat patani yang dipakai dalam kerangka penelitian James C. Scott adalah kategori petani dengan lahan sempit dan tanpa lahan. Sehingga yang terjadi adalah muncullah etika subsistensi dan term dahulukan selamat. Hampir sama seperti yang dikemukakan oleh Scott, beberapa masalah yang dikemukakan oleh Aminah meliputi akses lahan yang menurun, pengorganisasian petani, perlindungan harga produk, dan layanan penyuluhan dari pemerintah yang terbatas.[22] Akses lahan yang menurun dalam konteks masyarakat Jawa disebabkan beberapa faktor, seperti bergantinya orientasi pertanian pada perekonomian lain dan pola pembagian warisan dalam masyarakat.

Selama ini terdapat Gapoktan yang merupakan organisasi kelompok petani. Namun dalam pengorganisasiannya lebih bersifat formalitas penyaluran bantuan saja. Belum ada peran pengembangan yang lebih komprehensif. Ketika masa panen raya petani menghadapi risiko harga sehingga harus merugi karena belum ada mekanisme perlindungan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan sistem pasar yang semi terbuka seperti saat ini, kestabilan harga hasil produksi sangat minim. Saat bencana datang masyarakat petani mengalami kerugian yang sangat besar. Sementara mitigasi dari pemerintah masih sangat minim dan ruangnya masih sangat sempit.

Dilihat dari realitas pola perekonomian, kebudayaan, dan keagamaan masyarakat petani di atas perlu langkah strategis dalam untuk mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat petani, antara lain mendorong perubahan pola perekonomian yang lebih berkembang melalui pemberdayaan komunitas petani, mendorong kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat petani, dan melakukan dorongan pemahaman agama yang kontekstual.

[22] Siti Amanah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 30

Perubahan pola perekonomian yang lebih berkembang melalui pemberdayaan komunitas petani sangat penting dilakukan. Berdasarkan tipologi masyarakat petani yang memiliki tingkat keeratan sosial yang kuat, pemberdayaan melalui komunitas akan menjadi sangat strategis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Siti Amanah, pemberdayaan berkaitan dengan adanya kekuatan mulai dari indifidu seseorang. Representasi adanya power tampak pada posisi, pengambilan keputusan, dan pengaruh. Secara definitif, Amanah memberikan gambaran bahwa pemberdayaan merupakan upaya perubahan dalam struktur sosial masyarakat, karena proses *power sharing*, peningkatan kemampuan, dan penetapan kewenangan.[23]

Secara lebih aplikatif Soetomo memberikan gambaran mengenai karakteristik pengelolaan sumber daya berbasis komunitas. Pola ini mencakup tiga hal yang harus dilakukan. *Pertama,* mekanisme proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan perlu difasilitasi dan bentuk institusi sosial yang cukup mengakar dalam masyarakat yang bersangkutan. *Kedua,* pemberian kewenangan kepada masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan yang didukung oleh kapasitas masyarakat. Kapasitas yang dimaksud meliputi kapasitas dalam identifikasi persoalan dan kebutuhan, identifikasi sumber daya dan peluang, serta kapasitas pengelolaan sumber daya. *Ketiga,* desentralisasi yang mengandung makna pendelegasian wewenang kepada masyarakat lokal.[24]

Keadaan komunitas yang berdaya memiliki empat indikator. Indikator pertama, suatu komunitas mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya. Indikator kedua, komunitas mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan skala prioritas. Indikator ketiga, komunitas mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang telah disetujui. Indikator keempat adalah komunitas mampu bekerjasama rasional dalam bertindak mencapai tujuan.[25] Keempat indikator inilah yang menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai keberdayaan suatu komunitas dalam masyarakat.

---

[23] Siti Amanah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 2

[24] Soetomo, *Strategi Pembangunan Masyarakat,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 401

[25] Ambar Teguh Sulistiyani, *kemitraan dan Model-model Pemberdayaan,* (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm. 82

Mendorong kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat petani harus menjadi agenda utama dari sektor kebijakan. Program kelembagaan lokal dan program pemberdayaan baru menjadi program percontohan dari pemerintah. Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP) merupakan program pilot projek sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Proyek ini dilaksanakan tahun 2007-2011 melaui program yang diawali dengan penelitian dan penyuluhan pertanian yang memenuhi kebutuhan petani dalam menghadapai perkembangan ekonomi global. Tujuan program ini untuk memberdayakan patani dan organisasi petani dalam meningkatkan produktifitas, pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan aksesibilitas terhadap informasi, teknologi, modal dan sarana produksi, pengembangan agribisnis dan kemitraan usaha.[26]

Proses pemberdayaan ini menggunakan pendidikan orang dewasa yang partisipatif. Proses kegiatan dilakukan mulai dari kajian desa secara partisipatif dengan fasilitasi oleh penyuluh swadaya yang dipilih secara demokratis oleh dan untuk masyarakat. Program ini mencakup lima komponen kegiatan utama yaitu komponen penguatan sistem penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan petani, komponen penguatan kelembagaan dan kemampuan petugas, komponen peningkatan kapasitas Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dalam pengkajian dan diseminasi teknologi pertanian, komponen perbaikan pelayanan informasi dan teknologi untuk petani, dan komponen penguatan dan perbaikan dukungan kebijakan dan manajemen pusat.[27] Sebagai salah satu permasalahan yang mendesak pengembangan semacam ini tidak hanya dijadikan sebagai percontohan, namun harus segera diterapkan di berbagai daerah.

Melakukan dorongan pemahaman agama yang kontekstual sangat penting. Dalam pandangan dan cara beragama masyarakat Islam pada umumnya, terutama masyarakat petani lebih banyak menggunakan pola *talfiq qouli* atau mengikuti secara tektual. Permasalahannya adalah dengan pandangan ini menjadikan banyak sekali permasalahan belum bisa terselesaikan. Salah satunya terkait pandangan mengenai

[26] Siti Amanah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 41

[27] Siti Amanah dan Narni Farmayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 43

zakat dan semangat yang diusung di dalamnya. Semangat mengubah panerima menjadi pemberi zakat adalah proses pemberdayaan bagi semua lapisan masyarakat islam, tida terkecuali masyarakat petani.

Dalam konteks masyarakat petani banyak sekali pola pemikiran yang masih tertutup. Pemahaman yang didapatkan dari beberapa Kyai atau Ulama dianggap sebagai teks suci yang tidak bisa diganggu gugat. Beberapa pemahaman terkait pola perekonomian yang lebih mengedepankan *narimo ing pandum* menjadi ciri khas pemikiran masyarakat petani. Padahal itu bertentangan dengan semangat yang diusung dari konsep zakat. Semua sektor, baik pertanian, perdagangan, dan lain-lain diwajibkan untuk melaksanakan zakat. Hal ini secara tidak langsung memberikan motivasi bahwa semua muslim diwajibkan untuk bisa lebih berdaya agar hidupnya lebih sejahtera. Motivasi ini juga senada dengan *maqosidussyariah.*

E. Penutup

Masalah kemiskinan dan keterbelakangan yang sampai sekarang masih lekat dengan petani yang mendesak untuk segera diatasi. Untuk itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam, kritis, dan komprehensif. Pola perekonomian masyarakat yang mendahulukan selamat dengan mekanisme berbagi resiko merupakan salah satu gambaran pilihan perekonomian subsistens mereka. Pola ini muncul karena berbagai hal, salah satunya struktur sosial yang tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat petani untuk bangkit dari keterpurukan ini. Selain itu, dalam konteks sejarah, pemerintah belum bisa memberikan kontribusi nyata dalam usaha pensejahteraan masyarakat pedesaan ini.

Berbagai hal yang dianggap sebagai faktor pengikat perekonomian subsisten banyak diberikan pada petani, terutama petani berlahan sempit dan petani tanpa lahan. Tidak adanya inovasi, tidak adanya jaringan, meminimalisir resiko, minimnya lahan, dan masih banyak lagi. Dilihat dari sosial keagamaan terdapat pola pemahaman yang eksklusif. Sebagai masyarakat yang memiliki tingkat homogenitas dan kebersamaan yang tinggi, terdapat nilai-nilai yang dijunjung secara lebih tinggi. Namun sayangnya terkadang nilai-nilai kebudayaan yang terakulturasi dengan nilai agama ini dimaknai sebagai pemahaman yang suci. Sehingga pemikiran-pemikiran yang baru sangat susah diterima dalam masyarakat petani. Salah satunya adalah

pemikiran terkait zakat produktif. Nilai-nilai motivasi untuk mengejar kesejahteraan umat tida banyak dipahami oleh masyarakat. Dalam konteks inilah perlu dilakukan tiga langkah strategis, mulai dari pola pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan komunitas petani, mendorong kebijakan keberpihakan pemerintah yang lebih masif, sampai pada memberikan pemahaman keagamaan yang lebih terbuka.

Daftar Pustaka

Amanah, Siti dan Narni Farmayanti, 2014. *Pemberdayaan Sosial Petani-Nelayan, Keunikan Agroekosistem, dan Daya Saing,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Asmani, Jamal Ma'mur, 2007. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi,* Surabaya: Khalista.

Fattah, Munawir Abdul, 2011. *Tradisi Orang-orang NU,* Yogyakarta: LkiS.

Kleden, Ignas, 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan,* Jakarta: LP3ES.

Koentjaraningrat, 2015. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan,* Jakarta: Gramedia.

Mahfudh, Sahal, 2011. *Dialog Problematika Umat,* Surabaya: Khalista.

Pandaleke, Alfien, 2015. *Sosiologi Perkotaan,* Bogor: Maxindo Internasional.

Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003. *" Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia",* Departemen Agama RI.

Rasjid, Sulaiman, 2007. *Fiqh Islam,* Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.

Scott, James C. 1981. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara,* Jakarta: LP3ES.

Soekanto, Soerjono, 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar,* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soetomo, *Strategi Pembangunan Masyarakat,* 2013 Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan,* Yogyakarta: Gava Media.

Victor T. King, *Moral Ekonomi Petani: Antara Subsistensi dan Resistensi* diakses dari http://etnohistori.org/moral-ekonomi-petani-antara-subsistensi-dan-resistensi.html pada 14/03/2017

Diakses melalui https://jateng.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1101 pada 10/03/2017

Diakses melalui https://jateng.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/20 pada 10/03/2017

Diakses melalui https://jateng.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/10 pada 10/03/2017